

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan penataan ruang dan urusan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai peran dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan ruang dan perumahan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan teknis dibidang penataan ruang, permukiman, dan bangunan;
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang, permukiman, dan bangunan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang meliputi : Rasio Perumahan kumuh/Kesenjangan Kebutuhan Perumahan (*Backlog*), Rasio Penyehatan Lingkungan, Acuan RDTRK/RTRK, Jalan Lingkungan/Setapak, Bangunan-bangunan Pemerintah dan Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki perijinan.

Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan Bidang Tata Ruang

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang tata ruang, sebagai berikut:

1. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai payung hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
2. Belum tersedianya peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat pesat untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Kurangnya peraturan kepala daerah bidang penataan ruang untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
4. Rendahnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang
5. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang masih rendah
6. Kualitas rencana tata ruang yang masih kurang sebagai landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan
7. Belum terwujudnya pelaksanaan pembangunan secara terpadu mengacu pada rencana tata ruang
8. Belum terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang
9. Belum tersedianya produk hukum daerah bidang penataan ruang
10. Dokumen rencana tata ruang yang belum sesuai dengan NSPK Bidang Penataan Ruang
11. Belum terpadunya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan maupun rencana induk sektoral
12. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang
13. Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penataan ruang
14. Belum tersediannya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
15. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang
16. Dokumen perencanaan tentang Rencana Rinci (RDTR dan Peraturan Zonasi / Kawasan strategis) belum sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011;
17. Belum adanya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang ;
18. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang;
19. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis kabupaten guna mendorong perkembangan kewilayahan khususnya kawasan pusat perdagangan dan jasa;
20. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencana tata ruang, sehingga banyak bangunan tanpa IMB;
21. Belum adanya rencana rinci dan integrative dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya;
22. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan

local dalam konsep penataan kawasan kota;

23. Belum adanya sistem informasi (berbasis GIS) tentang rencana pola pemanfaatan tata ruang dan peraturan zonasi di semua wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

b. Permasalahan Bidang Permukiman

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai;
2. Kesenambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial.
3. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
4. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
5. Banyaknya permohonan pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya;
6. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;
7. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi kesehatan;
8. Penyusunan program kegiatan yang masih spasial dan bersifat sektoral;
9. Sarana operasional persampahan yang sudah tidak efektif dan minim untuk digunakan
10. Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih kurang
11. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah
12. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh perkotaan dan rumah tidak layak huni

c. Permasalahan Bidang Bangunan

1. Keterbatasan SDM dalam perencanaan dan pengawasan bangunan gedung seringkali tidak dapat mengimbangi volume pekerjaan
2. Kompetensi SDM yang ada harus ditingkatkan
3. Belum terealisasinya secara total pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan
4. Pengelolaan data dan informasi pembangunan di kawasan pusat pemerintahan belum optimal
5. Belum memiliki alat survey yang maksimal
6. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam pengendalian dan pengawasan
7. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perijinan
8. Perlunya pemeliharaan gedung-gedung pemerintahan secara berkala.

d. Permasalahan Bidang Jasa Kontruksi

1. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas
2. Kemampuan jasa kontruksi yang kurang memahami aturan jasa kontruksi sehingga kualitas pelaksanaannya masih terbatas
3. Minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

e. Permasalahan Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman

1. Belum memiliki SOP untuk perawatan kendaraan operasional pengelola kebersihan, persampahan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah
2. Banyak kendaraan operasional persampahan yang sudah tidak layak digunakan dan perlu pengadaan kendaraan operasional sampah yang baru
3. Kurangnya kontainer sampah sehingga perlu pengadaan tiap tahun untuk mencukupi kegiatan angkut sampah yang terus meningkat setiap tahun
4. Perlu pengadaan alat berat baru untuk kegiatan operasional persampahan
5. Kurangnya tenaga kerja di bidang perbengkelan
6. Fasilitas TPA yang masih serba kekurangan
7. Masih kurang tersebar nya TPS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
8. Kurangnya sosialisasi penyadaran masyarakat dalam mengelola sampah sampai tuntas ditempat.

9. Kurangnya koordinasi antar pemerintah dan instansi lain juga dengan masyarakat terkait pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat.
10. Terbatasnya lahan yang dimiliki pemerintah untuk ketersediaan pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau.
11. Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan taman-taman kota di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
12. Seringnya kegiatan yang menggunakan alun-alun sebagai tempat kegiatan sehingga menambah resiko rusaknya rumput dan taman di kawasan tersebut.

f. Permasalahan Bidang Kebakaran

1. Tidak tersedianya kendaraan yang memadai
2. Minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang belum mengikuti sertifikasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

VISI KABUPATEN TASIKMALAYA

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, DINAMIS DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Misi Kabupaten Tasikmalaya

Sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya, maka ditetapkan 5(lima) misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016–2021 (sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi,sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakulqarimah ;
2. mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata;
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

4. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

Telaahan terhadap visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan Misi ke 4 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan. Pada misi keempat ini Dinas Tata Ruang dan Permukiman berperan dalam sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya kualitas infrastruktur wilayah yang berbasis tata ruang yang berkelanjutan melalui beberapa hal diantaranya:
 - 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 2) Pengembangan Perumahan
 - 3) Perencanaan Penataan Ruang
 - 4) Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan
 - 5) Pemanfaatan Ruang
 - 6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 7) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran
 - 8) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
 - 9) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan
 - 10) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 11) Pengelolaan Areal Permakaman
 - 12) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DISTARKIM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan	1 Belum tersedianya peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat pesat untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.	Proses penyusunan Ranperda yang panjang dan adanya aturan-aturan baru tentang tata cara proses pemerdaan Rencana Rinci Tata Ruang	Kebutuhan masyarakat dalam perizinan pemanfaatan ruang
		2 Rendahnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang	Lemahnya koordinasi dan keterbatasan SDM	Adanya sanksi hukum terhadap penyelenggaraan penataan ruang
		3 Kualitas rencana tata ruang yang masih kurang sebagai landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Keterbatasan dalam proses penyusunan rencana tata ruang	Ketersediaan SDM tata ruang yang <i>qualified</i>
		4 Belum terwujudnya pelaksanaan pembangunan secara terpadu mengacu pada rencana tata ruang	<i>Stakeholder</i> belum semuanya mengacu pada Rencana Tata Ruang dan fungsi koordinasi yang lemah	Tingginya atau pesatnya dinamika pembangunan
		5 Belum terpadunya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan maupun rencana induk sektoral	Waktu penyusunan tidak sinkron	Pelayanan masyarakat yang semakin meningkat memerlukan sinkronisasi rencana pembangunan
		6 Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	Lemahnya perencanaan prioritas program yang terkait penyelenggaraan penataan ruang	Urgensi kebutuhan instrument pengendalian karena meningkatnya dinamika pembangunan
		7 Belum tersediannya Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Lemahnya prioritas program penyelenggaraan penataan ruang	Kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan
		8 Belum adanya sistem informasi (berbasis GIS) tentang rencana pola pemanfaatan tata ruang dan peraturan zonasi di semua wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mempermudah pelayanan kepada	Lemahnya prioritas program penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan informasi rencana

No.	Misi	Permasalahan Pelayanan DISTARKIM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat.		tata ruang
		9 Kesinambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial.		
		10 Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;		
		11 Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;		
		12 Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sanitasi kesehatan;		
		13 Sarana operasional persampahan yang sudah tidak efektif dan minim untuk digunakan		
		14 Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masih kurang		
		15 Belum terealisasinya secara total pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kawasan Pusat Pemerintahan		
		16 Pengelolaan data dan informasi pembangunan di kawasan pusat pemerintahan belum optimal		
		17 Rusaknya gedung pemerintahan		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait

Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang, dan Perumahan Kabupaten Tasikmalaya juga mengacu kepada :

A. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

*“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN*

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal kawasan perbatasan dan kawasan perbatasan dan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan. Kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien , pelaksanaan yg tepat dan pengawasan yang ketat.

B. Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Republik Indonesia adalah :

*“TERWUJUDNYA SINERGI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN
BERBASIS PENATAAN RUANG”*

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matraspasial dari pembangunan nasional dan daerah;
2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang;
3. Memantapkan kelembagaan bidang penataan ruang yang efektif dan responsif dalam menyelenggarakan tugas turbin kalwas penataan ruang.

C. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah :

“DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan peningkatan uji mutu

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016 - 2020 akan diprioritaskan kepada pembangunan lima pusat pertumbuhan. Kelima pusat pertumbuhan itu berada di Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Ciawi, Manonjaya dan Singaparna. Arah pembangunan disesuaikan dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Issue strategis yang merupakan permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain : mutu dan tata kelola pendidikan dasar; akses pendidikan menengah dan tinggi; kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis; pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan, penataan ruang dan pemanfaatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; penyelenggaraan penanggulangan bencana; penanggulangan kemiskinan; perlindungan dan jaminan sosial; pengangguran; pengarusutamaan gender dalam

pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak; ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik; pertumbuhan dan persebaran penduduk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat; perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM; arus kunjungan wisata; reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan bersih; alih fungsi lahan pertanian; nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan kemampuan riil keuangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah utama pembangunan daerah adalah tercapainya tujuan pembangunan daerah yang ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; menciptakan kesempatan kerja dan lapangan berusaha; dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penentuan arah pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2016-2020 berpedoman pada :

1. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
3. Nawa Cita Pembangunan Nasional
4. Common Goals Pembangunan Jawa Barat dan Pengembangan Priangan Timur

Fase Ketiga RPJPD 2005-2025 dengan orientasi sekaligus menjadi kata kunci yaitu: pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas. Penelaahan Renstra Dinas Tarkim dengan RTRW Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang Provinsi. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan mewujudkan :

- a. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian, adapun starteginya:
 - 1) menetapkan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - 2) merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi; dan
 - 3) meningkatkan produktivitas lahan sawah tadah hujan dan pertanian tanaman pangan;
- b. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - 1) memulihkan fungsi kawasan lindung secara bertahap;

- 2) mengoptimalkan upaya pencapaian luas kawasan lindung sebesar 64,35%;
 - 3) mengendalikan pembangunan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung;
 - 4) mengoptimalkan pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan;
 - 5) mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung; dan
 - 6) merehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung.
- c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- 1) mempersiapkan ketentuan pengelolaan pesisir dan laut;
 - 2) merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - 3) mengembangkan budidaya perikanan;
 - 4) mengembangkan hutan bakau;
 - 5) mengembangkan perikanan tangkap; dan
 - 6) mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.
- d. Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
- 1) mengembangkan wilayah fungsional kota secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
 - 2) memantapkan pengembangan wilayah;
 - 3) mengembangkan wilayah fungsional ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL; dan
 - 4) mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- 1) meningkatkan akses jaringan jalan;
 - 2) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah;
 - 3) mengembangkan sistem angkutan umum masal di kawasan perkotaan;
 - 4) mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah;
 - 5) mengembangkan sistem energi;
 - 6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumberdaya air berbasis DAS;

- 7) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - 8) mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- 1) meningkatkan prasarana transportasi;
 - 2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - 3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - 4) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di pusat kegiatan; dan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir
- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- 1) merevitalisasi kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
 - 2) mengarahkan pengembangan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan.
 - 3) peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
 - a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan

Tabel 3.2.
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaahan RTRW
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	RTRW	Permasalahan Pelayanan Distarkim	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Masih terdapatnya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan perencanaan	Kurangnya konsistensi pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan serta belum tersusunnya dokumen rinci sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang	Dokumen RTRW yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PELAYANAN PENGEMBANGAN SKPD
1	2	3	4	5	6
A.	Sistem Perkotaan				
	a. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Prasarana dan sarana pemerintahan serta pasilitas penunjang kawasan pusat pemerintahan. 	Ada	Singaparna
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 	Ada	Singaparna
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 	Ada	Karangnunggal
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung 	Ada	Singaparna

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PELAYANAN PENGEMBANGAN SKPD
1	2	3	4	5	6
			kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain.		
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana pelayanan umum gedung kesenian, ruang terbuka hijau, taman tempat bermain 	Ada	Karangnunggal
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi. 	Ada	Singaparna
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemanfaatan TPA Sampah Nangkaleah 	Ada	Singaparna
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan. 	Ada	Singaparna Karangnunggal
			<ul style="list-style-type: none"> Pemerdaan Rencana Detail Kawasan Perkotaan 	ada	Singaparna Karangnunggal
			<ul style="list-style-type: none"> Penataan infrastruktur kecamatan 	Ada	Singaparna Karangnunggal
	b. Pengemb gan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RDTR 	Ada	Ciawi Manonjaya
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah 	Ada	Ciawi Manonjaya
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sport centre regional 	Ada	Ciawi
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana olah raga dan rekreasi sport centre skala pelayanan lokal 	Ada	Manonjaya
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemanfaatan TPA sampah Guranteng 	Ada	Ciawi
	c. Pengemb gan dan		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah sakit Umum Daerah 	Ada	Cikatomas

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PELAYANAN PENGEMBANGAN SKPD
1	2	3	4	5	6
	Pemanapan Fungsi Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan infrastruktur kecamatan 	Ada	Rajapolah, Mangunreja, Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cibalong, Cikatomas, Cineam
			<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RDTR 	Ada	Taraju, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas,
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir 	Ada	Cipatujah
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan minapolitan (kota ikan) 	Ada	Cipatujah
	a. Sistem Prasarana lainnya				
	<ul style="list-style-type: none"> sistem jaringan persampahan 		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan tempat penampungan sampah sementara 		Setiap kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi tempat pemrosesan akhir sampah 		Mangunreja
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah 		Manonjaya, Pagerageung, Karangnunggal
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah 		Cigalontang
	<ul style="list-style-type: none"> sistem jaringan air minum 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan pengolahan air minum 		Cipondok, Cikawali, Cibunigeulis, Cilangla, Cianeut, Cigelap, Cimaung, Cikondang, Cipanyusupan, Cisaladah, Cibatur, Cisitu,

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PELAYANAN PENGEMBANGAN SKPD
1	2	3	4	5	6
					Cibulak. Dan Cibuntu.
			<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan jaringan pipa distribusi. 		Seluruh kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan jaringan perpipaan air minum 		Kawasan perkotaan
	<ul style="list-style-type: none"> • sistem jaringan sanitasi 		<ul style="list-style-type: none"> • pengendalian pengolahan limbah industri. • pengembangan instalasi pengolahan air limbah. 		Bantarkalong, Cikatomas, Singaparna, Ciawi, Manonjaya, Cipatujah, Taraju
	<ul style="list-style-type: none"> • sistem jaringan drainase 		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan saluran drainase. 		Seluruh kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan saluran drainase 		Seluruh Kecamatan

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Lindung				
3	Kawasan Strategis Kabupaten				

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
	a. kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RTR KSK Kota Ciawi; • penyusunan RTR KSK Kota Manonjaya; • penyusunan RTR KSK Kota Karangnunggal • penyusunan RTR KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah; • penyusunan RTR KSK Wisata Pantai Karangtawulan • penyusunan RTR KSK Wisata Alam Gunung Galunggung; • penataan kawasan Wisata Alam Galunggung. 		
	b. pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya		<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RTR KSK Kampung Naga; • penyusunan RTR KSK Wisata Ziarah Pamijahan • penyusunan RTR KSK Pesantren Suryalaya • penyusunan RTR KSK Pesantren Cipasung 		

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
	c. pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sumber daya		<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RTR KSK Geothermal Karaha Bodas • penyusunan RTR Kawasan Strategis Plasma Nuftah Sirah Cimunjul • penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper • penyusunan Master Plan Kawasan Pertambangan • penyusunan Master Plan Kawasan pesisir 		

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan pembangunan Infrastruktur kedepan harus mampu mendorong peningkatan kualitas lingkungan termasuk dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure),

mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Tabel 3.5
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Tasikmalaya

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan			
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam			
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk	KLHS belum diimplementasikan dalam proses pelaksanaan	Belum adanya penerapan	KLHS diamanatkan dalam UU

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	pembangunan	sanksi bagi pelanggar terhadap KLHS	Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang
- 2) Belum meningkatnya status status hierarki struktur ruang Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Ciawi dan (PKLp) Manonjaya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta status PPK Rajapolah dan PPK Cikatomas menjadi PKLp
- 3) Belum terselesaikannya perwujudan ruang kawasan Ibu Kota dan kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya
- 4) Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% (persen) dari luas wilayah kota di Kabupaten Tasikmalaya
- 5) Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang
- 6) Belum adanya PPNS penataan ruang dan PPNS Bangunan
- 7) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
- 8) Masih adanya wilayah rawan air bersih
- 9) Lemahnya perlindungan sumber mata air
- 10) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
- 11) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada
- 12) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
- 13) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
- 14) Masih adanya wilayah rawan air bersih
- 15) Lemahnya perlindungan sumber mata air

